PANCASILA: HAKIKAT BANGSA ATAU PROSES PENGHAYATAN?

PROTASIUS HARDONO HADI, PR

Pancasila dipandang secara sosiologis lebih merupakan suatu kesepakatan atau kompromi antara unsur-unsur yang membentuk bangsa Indonesia. Dengan kata 'kesepakatan' atau 'kompromi' diinsinuasikan bahwa kedudukan Pancasila berada pada *tataran sosial*. Artinya, Pancasila diandaikan berperan di dalam pergaulan dan kehidupan bersama, dan tidak kurang dan tidak lebih daripada itu. Dengan menekankan kedudukannya pada tataran sosial, diandaikan bahwa Pancasila tidak perlu merembes masuk ke dalam kepribadian seseorang, betapa pun sejatinya orang tersebut sebagai orang Indonesia.

Tetapi, interpretasi kedudukan Pancasila di dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti itu segera ditatapkan pada kenyataan, pernyataan, tuntutan, dan aktivitas lain yang menekankan masalah *penghayatan dan pengamalan* Pancasila. Kata 'penghayatan' dan 'pengamalan' mempunyai konotasi sebagai internalisasi suatu nilai, sehingga menjadi bagian integral kepribadian. Dengan begitu, tuntutan ini rupanya dilatar belakangi oleh suatu cita-cita, agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasikan, dijadikan bagian integral di dalam kepribadian setiap manusia Indonesia.

Tentu saja kedua pengertian di atas, yaitu peran Pancasila yang berada di tataran kehidupan sosial dan tuntutan penghayatan dan pengamalannya, merupakan dua pengertian yang tidak dengan sendirinya bisa didamaikan begitu saja. Sebab, pengertian pertama hanya membatasi diri di dalam tataran kehidupan sosial yang tidak menyentuh hakikat pribadi seseorang, sedangkan pengertian kedua lebih menyangkut kehidupan pribadi seseorang yang sangat mendalam. Kalau begitu, sekokoh manakah dasar untuk membenarkan cita-cita mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila?

Tentu saja jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan sangat tergantung pada filsafat yang dianut dan dipergunakan seseorang untuk menginterpretasikannya. Pada kesempatan ini, akan kita lihat dasar-dasar filsafat mana yang memustahilkan pendamaian dua hal tersebut, dan kemudian kita lihat juga dasar-dasar filsafat mana yang bisa digunakan untuk membenarkan tuntutan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kalau kita berbicara secara filosofis, mau tidak mau kita akan sampai pada pengertian tentang essensi, bagaimanapun kata itu harus diinterpretasikan. Dari pernyataan ini sudah diisyaratkan bahwa ada beberapa pengertian mengenai essensi atau substansi yang berbeda satu dari yang lain. Lebih lagi, karena Pancasila berada dalam tataran kehidupan sosial *manusiawi*, mau tidak mau kita juga perlu melihat dan memahami mengenai *essensi / hakikat* atau *jatidiri* bila hal itu diterapkan pada manusia dan kedudukan relasi di dalamnya.

Kata *essensi* atau *hakikat* merupakan bahan studi filsafat yang tidak ada habisnya. Di dalam filsafat, segala sesuatu dicari essensinya agar manusia bisa berlaku dan memperlakukan pengalaman atau benda yang dialaminya secara bijaksana. Namun sudah merupakan pemahaman umum bahwa pengertian mengenai essensi ini tidak pernah mendapat kesepakatan umum di dalam sejarah filsafat. Setiap filsuf yang menggunakan kata itu harus menjelaskan terlebih dulu apa yang dimaksudkannya.

Untuk kepentingan kita di sini, kita hanya akan mengambil dua paham yang penting di dalam filsafat mengenai essensi. Yang pertama adalah pemahaman *Aristotelian*, yang pengaruhnya sangat luas baik langsung maupun tidak langsung, khususnya berhubungan dengan pengertian essensi atau substansi. Yang kedua adalah pemahaman *Whiteheadian* yang menampilkan pengertian 'essensi' secara sangat berbeda. Kedua pemahaman mengenai essensi itu akan memberikan dasar berbeda bagi penjelasan mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Filsafat Aristotelian

Essensi menurut Aristoteles adalah sebab atau dasar adanya semua hal".[1] Essensi sendiri ditemukan di dalam benda-benda konkret indivi-

1. *On the Soul* 2.3.415b11-12.

dual yang disebutnya *substansi*. Substansi inilah yang menurutnya merupakan objek tepat bagi penyelidikan filosofis.[2] Aristoteles menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada bisa dikelompokkan ke dalam 10 kategori, yaitu substansi dan 9 aksiden.[3] Di antara aksiden-aksiden itu adalah *relasi* atau *hubungan*.

Dari pernyataan itu menjadi jelas bahwa relasi bagi Aristoteles hanyalah merupakan aksiden yang tidak masuk di dalam hakikat suatu benda. Kalau hal ini dikaitkan dengan manusia, maka relasi atau hubungan sosial bukanlah merupakan bagian integral dari jatidiri manusia.

Filsafat Aristoteles ini sebagian besar diambil alih dan diperkembangkan oleh St. Thomas Aquinas. Yang relevan bagi kita di sini adalah pembicaraan Aquinas berhubungan dengan substansi. Baginya substansi adalah sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan tidak merupakan bagian dari sesuatu yang lain. Dengan begitu Aquinas masih meneruskan Aristoteles yang beranggapan bahwa hubungan atau relasi hanyalah merupakan salah satu dari 9 aksiden di atas. Bahkan relasi bersifat lebih eksternal dibanding dengan aksiden-aksiden lain. Sebab sementara aksiden-aksiden lain melekat pada bendanya, relasi hanya ada sejauh menyangkut objek lain. Bagi Aquinas hanya dalam Allahlah relasi menjadi bagian integral dari essensi.

Namun pengertian Aquinas mengenai relasi ini tidaklah seutuhnya jelas, cenderung ambigu dan mondar-mandir di antara keduanya. Sebab, di satu pihak, meskipun relasi merupakan aksiden, hal itu sangat erat melekat pada kodrat atau essensi manusia. Hal ini sangat nyata di dalam ajarannya mengenai relasi antara individu dan masyarakat. Ia menyatakan dengan tegas bahwa manusia secara kodrati merupakan binatang sosial.[4]

Pandangan ini semakin dipertegas dengan teorinya mengenai hukum kodrati. Hukum kodrat, menurutnya, dapat dimengerti melalui kecenderungan manusia. Kecenderungan dasar *pertama* manusia adalah mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia tidak bisa sendirian. Maka manusia harus hidup di dalam

---

2. Aristoteles, *Metaphysics*, Z, I, 1028b 2-7, dlm. *The Basic Works of Aristotle*, ed. Richard McKeon, New York: Random House, 1941, hlm. 783-784. Garis bawah asli.
3. *Topics* 1.9.103b21-24.
4. *S.T.* I.q.96, a. 4.

suatu masyarakat. Kecenderungan dasar yang *kedua* manusia adalah mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya dengan cara berketurunan. Untuk mewujudkan kecenderungan itu manusia tidak dapat melaksanakannya sendiri. Sedangkan kecenderungan yang *ketiga* manusia, sebagai makhluk rasional, adalah mencari kebenaran mengenai Allah dan hidup di dalam suatu masyarakat.

Tambahan lagi hubungan antara individu dengan masyarakatnya digambarkannya sebagai hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Bagian dimengerti sebagai yang kurang sempurna dibandingkan dengan masyarakat sebagai keseluruhan.[5] Maka hukum suatu masyarakat harus diperintahkan demi kepentingan umum. Apalagi kepentingan umum atau keseluruhan harus mendapat prioritas daripada kepentingan individu. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut harus disimpulkan bahwa bagi Aquinas relasi minimal merupakan bagian integral, kalau bukan bagian terpenting, dari kodrat manusia.

Namun pengertian ini segera disusul oleh sikapnya yang tidak mau merendahkan individu. De fakto, di dalam tulisannya mengenai hukum, ia menekankan bahwa hukum harus kondusif demi kepentingan individu yang menjadi anggota masyarakat bersangkutan. Dengan demikian tujuan dari hukum adalah manusia individual sendiri, sedangkan masyarakat merupakan kereta tunggangannya. Akibatnya, di sini hubungan dengan masyarakat berperan sebagai sarana demi kepentingan individu.

Dari pengertian Aquinas yang mendua di mana kedua ujungnya tidak terlalu mudah untuk disatukan itu, tentu saja bisa ditarik tiga macam paham mengenai manusia: sosialistis kalau menekankan superioritas masyarakat sebagaimana terdapat di dalam filsafat Spinoza dan Hegel; atau individualistis kalau mau menekankan individu sebagai tujuan terakhir seperti ditekankan oleh J.S. Mill; atau kompromis yang melihat pentingnya masing-masing aspek tetapi tidak bisa menyatukan di dalam pengertian yang tegas sebagaimana terdapat di dalam filsafat Hobbes.

Memang harus diakui bahwa pemahaman Aristotelian mengenai essensi dan substansi ini tetap berperan penting dan jarang mendapatkan reinterpretasi yang memadai di dalam sejarah filsafat. Tetapi filsafat model Aristotelian dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, kalau mau

5. *S.T.* I-II, q.90, a. 1, 2 dan 3.

diletakkan dalam konteks pembicaraan kita di atas, jelas tidak kondusif pada penghayatan dan pengamalan Pancasila yang menuntut internalisasi manusia Indonesia secara konklusif.

Filsafat Proses

Kegagalan filsafat Aristotelian untuk membantu mencari pemahaman sampai kepada pengalaman konkret, merupakan perhatian istimewa Alfred North Whitehead. Whitehead sejak awal menyadari betul bahwa pengertian essensi model Aristotelian tersebut justru menjadi sumber kemacetan untuk memahami perkembangan yang de fakto merupakan kenyataan sentral di dalam pengalaman.[6]

Untuk itu Whitehead tidak mau lagi menggunakan istilah-istilah klasik seperti essensi, substansi, aksiden, dsb. yang baginya sudah memuat pengertian-pengertian beku yang mematikan daya nalar untuk memperkembangkan pemahaman yang koheren, logis dan tepat-guna. Untuk mengatasi kebekuan itulah Whitehead mengukir istilah-istilah baru yang belum pernah dipergunakan di dalam filsafat.

Istilah yang sangat penting di dalam filsafatnya ialah entitas aktual atau *actual entity*. Entitas aktual digambarkan oleh Whitehead sebagai unsur terkecil yang terbayangkan yang menjadi pembentuk dunia.[7]

> "Entitas aktual berbeda satu dari yang lain: Allah adalah entitas aktual, demikian pula unsur paling remeh yang berada di ruang hampa di tempat jauh sana. Tetapi, meskipun ada taraf-taraf dalam hal pentingnya, dan keragaman fungsi, namun pada pokok-pokok yang ditampilkan oleh entitas aktual, semua berada dalam tingkat yang sama. Kenyataan terakhir adalah, semuanya sama, entitas aktual; dan entitas aktual ini merupakan titik pengalaman, yang bersifat kompleks dan saling terkait".[8]

Entitas aktual juga disebut "actual occasion", bila Whitehead ingin menekankan sifat ekstensifnya. Meskipun semua entitas aktual dari jenis yang sama, Whitehead membedakannya dalam empat taraf.[9] Sen-

6. Hardono Hadi, P., *A Whiteheadian Reflection on the Human Person*, hlm. 45-74.
7. "Entitas aktual" merupakan terjemahan dari "actual entity".
8. *Process and Reality*, hlm. 18.
9. *Ibid.*, hlm. 177. Selanjutnya, untuk menyederhanakan permasalahan dan mempermudah pemahaman, tidak akan dibedakan lagi antara 'actual entities' dan 'actual occasions'. Keduanya akan diterjemahkan dengan 'entitas aktual'.

tral di dalam memahami setiap "actual entity" atau "actual occasion" adalah proses pembentukan diri di waktu sekarang. Sebab menurut Whitehead, yang nyata dan konkret sekarang adalah proses pembentukan diri masing-masing entitas aktual. Dia menyatakan bahwa ada empat tahap dalam pembentukan diri sebuah entitas aktual. Tahap-tahap itu ialah *datum*, proses pengolahan, kepenuhan, dan keputusan.[10]

Sebuah entitas aktual baru harus muncul dari seluruh dunia di masa lampau yang terdiri dari entitas-entitas aktual yang telah mencapai kepenuhan masing-masing. Entitas-entitas aktual itulah yang menjadi bahan bagi entitas baru, sebab mereka masing-masing terdiri dari nilai-nilai yang sudah dipribadikan secara mantap di dalam skala nilai masing-masing.

Nilai-nilai yang melekat pada setiap entitas aktual di dunia ini berfungsi sebagai potensialitas bagi entitas-entitas aktual yang sedang berproses membentuk diri. Dengan demikian entitas-entitas aktual yang telah selesai membentuk diri, menjadi data awal dan potensialitas real bagi terjadinya konkresi entitas aktual baru.[11] Berarti entitas aktual baru tersebut tergantung pada dunia konkret dalam hal bahan-bahan yang akan dipribadikan di dalam konstitusinya sendiri, sekurang-kurangnya pada tahap awal pembentukan dirinya. Dengan begitu, dunia nyata menyediakan dan sekaligus membatasi kreativitas entitas aktual baru. Dunia aktual membatasi kreativitas entitas aktual baru, karena dunia itu terdiri dari entitas-entitas aktual. Entitas-entitas aktual tersebut dikatakan tertentu karena mereka telah mencapai nilai-nilai tertentu yang disusun dalam suatu skala nilai yang pasti berdasar prioritas tertentu pada waktu mereka mencapai tahap kepenuhan. Pada tahap kepenuhan tersebut, sebuah entitas aktual sudah tidak mengadakan perubahan, pembaruan, atau reorganisasi nilai, baik dalam hal jumlah maupun tata susunannya, di dalam dirinya. Mereka telah 'mati'. Mereka telah menghabiskan kreativitas diri di dalam mewujudkan kemungkinan relevan yang dipilih sebagai citra diri mereka. Maka, mereka hanya bisa berperan sebagai sebab efisien yang menawarkan nilai yang mereka miliki kepada entitas aktual baru. Karena dunia terdiri dari entitas-entitas aktual yang telah selesai membentuk diri, maka dunia juga tertentu dan terbatas.

---

10. *Ibid.*, hlm. 149-150.
11. 'Konkresi' adalah bertemunya semua unsur dunia di dalam satu titik tertentu yang menghasilkan entitas aktual baru.

Dari pembicaraan singkat mengenai proses pembentukan diri ini dapat kita lihat dua hal pokok. Pertama, menjadi nyata bahwa pada awal perkembangannya, sebuah entitas aktual merupakan *produk* dari interaksi dunia. Tentu saja yang sangat menentukan adalah lingkungan terdekatnya. Pengaruh dunia pada umumnya, dan pengaruh lingkungan pada khususnya, bukan hanya terbatas pada tepi eksistensinya, tetapi justru menyentuh inti essensinya.

Kedua, pada akhir perkembangannya, sebuah entitas aktual bersama entitas-entitas aktual yang lain merupakan *pembentuk* entitas baru. Namun perlu disadari bahwa sebagai pembentuk, entitas-entitas itu sendiri saling berinteraksi. Interaksi berarti saling menawarkan nilai-nilai yang telah dipribadikan masing-masing di dalam proses pembentukannya. Lalu lintas transaksi nilai tersebut lama kelamaan akan menimbulkan nilai-nilai dominan yang menjadi ciri bersama di dalam kelompok entitas aktual tersebut. Nilai-nilai dominan itu oleh Whitehead disebut *defining characteristics* atau karakter sosial masyarakat entitas-entitas aktual tersebut.

Dari pembicaraan yang terakhir ini dapat ditarik dua hal penting. Pertama, karakter sosial suatu masyarakat merupakan hasil interaksi anggota-anggotanya yang saling menawarkan nilai-nilai yang mereka pribadikan. Sebab di dalam interaksi antaranggota masyarakat di dalam waktu yang panjang, dengan sendirinya akan terjadi seleksi nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat itu. Nilai-nilai penting itu akhirnya memegang dominasi untuk menentukan kekhasan masyarakat itu.

Kedua, karakter sosial itu sendiri tentu saja harus dipribadikan, dihayati, dan diamalkan oleh masing-masing anggota kalau nilai-nilai dominan itu tetap berperan penting sebagai ciri khas masyarakat itu. Sebab, tanpa internalisasi oleh masing-masing anggota masyarakat, karakter sosial tersebut akan menjadi semakin kabur dan tidak jelas.

Dengan memanfaatkan filsafat prosesnya Whitehead, tidaklah terlalu sulit untuk menarik pengertian mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sebab Pancasila boleh dikatakan sebagai pilihan bangsa Indonesia untuk dijadikan *defining characteristics*-nya. Sebagai karakter sosial suatu bangsa, Pancasila sekaligus merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Menurut Stanley I. Benn, cita-cita bersama yang sifatnya positip merupakan syarat terpenting terjadinya suatu bangsa.[12]

12. Benn, Stanley I., "Nationalism", dlm.: *Encyclopedia of Philosophy*, vol. 5, New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press, 1987, hlm. 443-445.

Namun perlu disadari pula bahwa karakter sosial bukanlah sesuatu yang mempunyai kepastian absolut sebagai rumus umum yang tinggal menerapkan di dalam kehidupan konkret sebagaimana terdapat di dalam matematika. Hidup, menurut Kierkegaard, bukanlah rumus matematik ataupun logika. Hidup bagi para eksistensialis justru merupakan misteri yang setiap kali harus diperjelas, namun tidak pernah mencapai titik jelas absolut. Sebab bagi mereka hidup tidak pernah akan mencapai penyelesaiannya.

Demikian pula dengan kehidupan bangsa Indonesia yang ditandai oleh Pancasila sebagai karakter sosialnya. Kalau Pancasila benar-benar hidup haruslah menjadi bagian integral dari masing-masing manusia Indonesia yang berusaha untuk semakin mengkonkretkan di dalam kehidupan harian. Namun pengkonkretan ini tidak pernah boleh menjadi rumus beku yang mati, sehingga tidak memungkinkan perkembangan lagi. Sebab tanpa perkembangan, kehidupan sebenarnya sudah berakhir meskipun mungkin belum masuk kubur.

Dengan demikian keseriusan bangsa Indonesia untuk mengangkat Pancasila sebagai karakter sosialnya, juga sangat tergantung bagaimana masing-masing anggota menghidupi nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Kiranya di sinilah pengertian "penghayatan dan pengamalan Pancasila" bisa mendapatkan dasarnya.

Kesimpulan

Dari pembicaraan di atas kiranya bisa ditarik beberapa kesimpulan yang penting:

1. Filsafat model Aristotelian tidak mampu meletakkan relasi di dalam pusat essensi. Meskipun Aquinas melihat pentingnya relasi di dalam kehidupan kemasyaratan, namun telaahnya tidak konklusif. Akibatnya, banyak pengalaman konkret seperti Pancasila beserta penghayatan dan pengamalannya tidak bisa dirangkum dan dijelaskan oleh filsafat model ini.
2. Untuk bisa menjelaskan secara jernih kedudukan Pancasila di dalam kehidupan bangsa Indonesia, filsafat proses model Whitehead kiranya sangat membantu.
3. Pancasila kalau mau dijadikan cita-cita bersama bangsa Indonesia, harus dimengerti sebagai karakter sosial bangsa.
4. Dari satu pihak, sebagai karakter sosial yang benar-benar berarti, Pancasila perlu diinternalisasi oleh anggota-anggotanya sebagai bagian integral pembentuk kehidupan mereka. Dari lain pihak,

sebagai karakter sosial bangsa Indonesia, Pancasila harus semakin diperkembangkan berkat interaksi anggota-anggota masyarakat Indonesia yang selalu mengolahnya di dalam kehidupan masing-masing.

5. Untuk itu perlu sikap arif bangsa Indonesia di dalam merangkul Pancasila. Kearifan ini mempunyai dua ujung. Yang pertama menyangkut pergaulan intern antaranggota masyarakat Indonesia sendiri. Sedangkan ujung kedua berhubungan dengan pergaulan internasional dengan bangsa-bangsa lain. Berhubungan dengan yang intern harus diperhatikan dua aspek yang tidak boleh dihilangkan. Dari satu pihak, untuk bisa berlaku sebagai *defining characteristics* yang memberi pedoman hidup, Pancasila harus jelas isinya. Dari lain pihak, sebagai hasil interaksi antaranggota bangsa Indonesia, Pancasila tidak boleh dibekukan agar selalu hidup dan berkembang.

Sedangkan berhubungan dengan pergaulan internasional, ada dua hal pula yang perlu diperhatikan. Dari satu pihak, harus ada kepercayaan diri bangsa Indonesia mengenai Pancasila agar bertolak dari itu bisa memainkan peran positip dengan menyumbangkan nilai-nilai tertentu di dalam pergaulan internasional. Dari lain pihak, harus ada keterbukaan bangsa Indonesia dengan Pancasilanya terhadap nilai-nilai positip lain yang telah berkembang di dalam karakter sosial bangsa-bangsa lain, sehingga Pancasila sendiri semakin kaya dan utuh.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa bisa dan tidaknya penghayatan dan pengamalan Pancasila dijelaskan secara filosofis sangatlah tergantung dari filsafat mana yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

— 1972 *An Aquinas Reader, Selections from the writing of Thomas Aquinas,* ed. Mary T. Clark, New York: Image Book.

— 1941 *The Basic Works of Aristotle,* ed. Richard McKeon, New York: Random House, Inc.

Benn, Stanley I.
1987 "Democracy", dlm.: *Encyclopedia of Philosophy*, vol. 2, New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press, hlm. 338-341

Hardono Hadi, Protasius,
1989 *A Whiteheadian Reflection on the Human Person,* Ann Arbor, Michigan: U-M-I.

Whitehead, Alfred North,
1978 *Process and Reality,* ed. David Ray Griffin and Donald W. Sherburne, New York: The Free Press.